

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN AUDIT TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Taufik Dasmal¹, Yesi Mutia Basri², Novita Indrawati³

Universitas Riau
yesimutia@gmail.com

Abstract

The aim of the study to examine the effect of regional wealth, regional spending, intergovernmental revenue and audit findings on government performance regions. Population in this research are all regencies and city in Riau Province and all of them used as sample. The data used in this study are financial statements from 2014-2018. Result of Multiple regression Analysis shows that regional wealth and intergovernmental revenue have a significant effect on the performance of local governments, while regional spending and audit findings does not have a significant effect on the performance of local government This research has a contribution to the local government that is able to improve its performance through increasing regional wealth by exploring the potential of the region.

Keywords: Regional Wealth, Regional Expenditure, Intergovernmental Revenue, Audit Findings and Local Government Performance.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dan semuanya dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2014-2018. Hasil Analisis Regresi Berganda menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan pendapatan antar pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. yang mampu meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kekayaan daerah dengan menggali potensi daerah.

Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Antar Pemerintah, Temuan Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Kebijakan pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas kepada daerah memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah dapat diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi dengan cara penggunaan sumber daya yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas dicerminkan oleh pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan cerminan pencapaian kinerja pemerintah. Kinerja tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah secara optimal yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Namun kenyataannya, harapan akan pencapaian kinerja yang baik dengan adanya otonomi daerah tidak selalu sejalan dengan harapan publik. Terdapat banyak kritikan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan (Rini dan Damianti, 2017). Kinerja Pemerintah daerah yang disampaikan selama ini juga cenderung semu dan bias karena hanya menyampaikan program-program yang berhasil saja, sedangkan program yang gagal sering disembunyikan (Nurhamid, 2008)

Kinerja pemerintah daerah juga dapat dilihat dari kemandirian daerah tersebut (Halim, 2014). Dari hasil penelitian Angelina et al (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau sangat rendah. Rasio kemandirian hanya 50%. Rendahnya kinerja pemerintah daerah ini tentu akan berdampak terhadap pembangunan daerah.

Penelitian Ahyaruddin & Akbar (2018) juga mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah yang disampaikan hanya sebatas formalitas dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor koersif dalam bentuk tekanan regulasi seperti yang diungkapkan dalam teori isomorfisma institusional, yaitu untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan eksternal (Ahyaruddin & Akbar 2016, 2017; Ashworth, Boyne, & Delbridge 2009; Blume & Voight, 2011; Dimaggio & Powell 1983).

Rendahnya harapan kinerja pemerintah tersebut menjadi menarik untuk dikaji. Penelitian penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja pemerintah dari berbagai sisi. Peneliti menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah (Armaja et al,2017); Juwita (2017) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) Namun penelitian Suharti (2017); Usman dan Misra (2019) menunjukkan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian Purba (2006) menemukan belanja daerah berpengaruh yang positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun. Didukung oleh penelitian Rustiono (2008) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran daerah dapat meningkatkan kinerja ekonomi makro. Namun Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012); Harumiati dan Payamta(2014) menunjukkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Selain belanja daerah *intergovernmental revenue* juga merupakan faktor penghambat kinerja daerah. *Intergovernmental revenue* adalah “pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali” (Patrick, 2007). Hasil penelitian Simanullang (2013), Riesty (2016) dan Tesha (2014) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian Ayuningsih (2016) dan Erawati (2016) menunjukkan bahwa *Intergovernmental revenue* tidak memilikipengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) serta Masdiantini dan Erawati (2016) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit BPK dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah . Namun hasil penelitian Hasil penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016); Tama dan Adi (2018) menunjukkan bahwa temuan audit tidak memberikan efek pada kinerja keuangan pemerintah daerah di daerah distrik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali.

Berbeda dengan Suharti yang mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah, penelitian ini memfokuskan pada kinerja keuangan Pemerintah dengan menggunakan ukuran efisiensi (Halim,2004). Penelitian serupa di Provinsi Riau masih belum banyak dilakukan, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah(Kabupaten dan Kota) Se Provinsi Riau.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah se Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya.

Tinjauan Literatur

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). “Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”

Belanja Daerah

“Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

“Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.”

Intergovernmental Revenue

Lesmana (2010) mendefinisikan “*intergovernmental revenue* jenis pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi kepada Pemda untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, Pemda membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut Undang-Undang.” “*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah (Saputra, 2015). Menurut Patrick (2010:22)”,

Temuan Audit (BPK)

Temuan audit adalah penyimpangan-penyimpangan yang muncul akibat dilakukannya pemeriksaan atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan saat pemberian opini audit. Temuan audit yang di temui oleh BPK RI terdiri dari: “(1) kerugian daerah; (2) potensi kerugian daerah; (3) kekurangan penerimaan; (4) administrasi; (5) ketidakhematan; (6) ketidakefisienan; dan (7) ketidakefektifan (De angelo dalam Setyaningrum, 2012)”.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

“Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan merupakan sumber dari penerimaan asli daerah pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan. Semakin besar PAD pada suatu daerah maka sumber keuangan yang diperoleh semakin besar. Jumlah PAD yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan pencapaian program-program dan kegiatan pembangunan daerah. Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Hasil penelitian Hadi et al (2009) ; Fitriyanti dan Pratolo

(2009) menunjukkan bahwa kenaikan PAD berkorelasi positif dengan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas dihipotesiskan :

H₁: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja daerah berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Pengeluaran pembangunan untuk belanja daerah sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas SDM, dll. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Purba (2006) dan Rustiono (2008) menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pembangunan dapat meningkatkan kinerja ekonomi makro. maka dihipotesiskan:

H₂: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Intergovernmental Revenue yang merupakan pendapatan berasal dari sumber eksternal disebut juga dengan dana perimbangan. Dana perimbangan digunakan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Semakin besar dana perimbangan maka diperlukan pengawasan yang lebih dari pemerintah pusat. Hal ini akan mengakibatkan pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Dengan demikian akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat, yang menyebabkan pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya.

Hasil penelitian Riesty (2016) dan Tesha (2014) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan jika dana perimbangan besar maka kinerja keuangan baik, sehingga

rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dihipotesiskan:

H₃: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

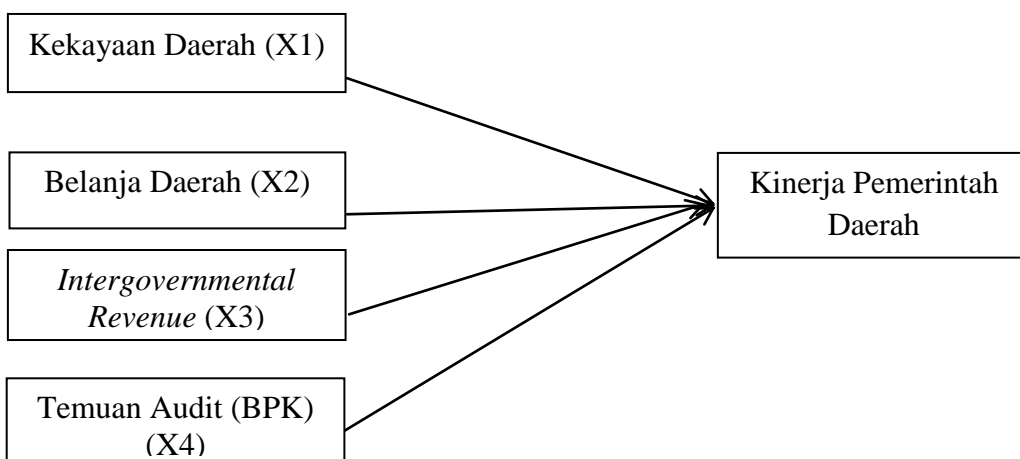
Pengaruh Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan temuan terhadap kasus-kasus atas pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian intern dan pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pemerintah daerah. Banyaknya temuan audit mengindikasikan buruknya kinerja pemerintah, Hal ini disebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan pengawasan dengan baik. Didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Masdiantini dan Erawati (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka dihipotesiskan :

H₄: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan peneliti sebelumnya dan kajian teoritis maka model penelitian digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1
Model Penelitian**

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yakni sebanyak 12 Kota/Kabupaten. Penentuan sampel menggunakan metode sensus artinya seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini mengingat 12 Kota/Kabupaten tersebut berada dalam kewenangan Propinsi Riau. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh 12 Kota/Kabupaten di Propinsi Riau dari tahun 2014-2018 (12 x 5 tahun = 60)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di publikasikan, laporan realisasi anggaran untuk data PAD dan total pendapatan, laju PDRB tahun 2014-2018.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Berikut tabel operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel dependen (Y) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	“Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi” (Bastian, 2006:117).	$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$
Variabel Kekayaan Daerah (X1)	“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Ardhani, 2011).	$= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
Variabel Belanja Daerah (X2)	“semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung”. (UU No.23 Tahun 2014)	$= \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Anggaran Belanja daerah}}$

Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i> (X4)	“Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat” (80%-98%) (Suhardjanto et al., 2010)	Total Dana Perimbangan = Total Pendapatan
Variabel Temuan Audit (BPK) (X5)	“Temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja”. (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012)	Temuan Audit (dalam rupiah) = Total Anggaran Belanja

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, *intergovernmental revenue*, temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kinerja pemerintah daerah	X3	= <i>Intergovernmental revenue</i>
α	= Konstanta	X4	= Temuan audit (BPK)
β	= Koefisien Regresi	ε	= Koefisien Error
X ₁	= Kekayaan daerah		
X ₂	= Belanja daerah		

Hasil dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kekayaan_daerh	60	.04	.32	.1057	.06177
Belanja_daerh	60	.00	2.79	.9263	.37977
Intergovernmental_revenue	60	.53	.90	.7333	.07725
Temuan_audit	8	.00	.01	.0021	.00173
Kinerja_pemda	60	.76	1.71	1.0470	.16964
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Data olahan dengan spss

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap variabel lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, yang menunjukkan data baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02847248
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.098
	Negative	-.173
Kolmogorov-Smirnov Z		.490
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* diatas diketahui nilai *P value* (*Asymp.Sig*) $0,970 > 0,05$. Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4. berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

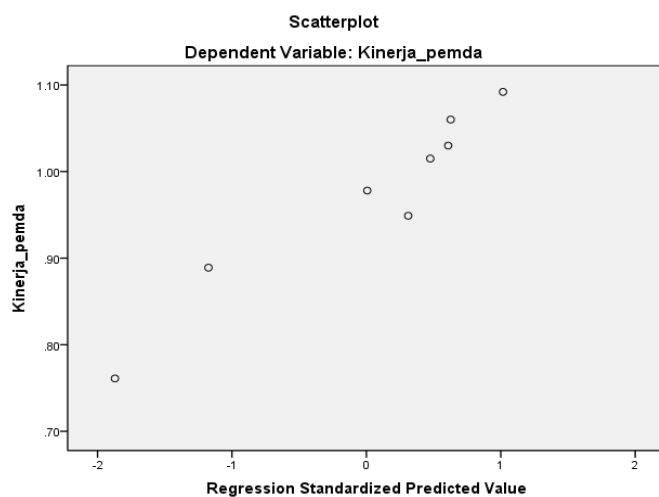
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kekayaan_daerh	.136	7.376	Tidak terdapat multikolinieritas
Belanja_daerh	.208	4.811	Tidak terdapat multikolinieritas
Intergov_reve	.101	9.873	Tidak terdapat multikolinieritas
Temuan_audit	.252	3.961	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai *tolerance* besar dari 0,1 dan nilai VIF kecil dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatter plot* dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji dapat dilihat hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini :

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 ^a	.928	.750	.05327	1.832

a. Predictors: (Constant), Temuan_audit, Rsio_kmandirian, Kekayaan_daerh, Belanja_daerh, Intergov_reve

b. Dependent Variable: Kinerja_pemda

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 5 diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) 1,832 terletak antara -2 dan $+2 = -2 < 1,832 < +2$ yang menunjukkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian hipotesis

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.942	.665		5.930	.027
Kekayaan_daerh	2.148	.932	1.184	2.305	.001
Belanja_daerh	.244	.219	.462	1.114	.381
Intergov_reve	3.565	.792	2.675	4.501	.000
Temuan_audit	43.602	23.202	.707	1.879	.201

Sumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS For Windows versi 23.0

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung kekayaan daerah (X_1) (2,305) > t tabel (2,00) dengan p value 0.001 (<0.005). Nilai koefisien beta menunjukkan nilai positif 2,248 sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima yaitu kekayaan daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Hal ini menunjukkan semakin besar kekayaan daerah maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

Tingkat kekayaan yang besar mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut. Tingkat kekayaan dapat mempengaruhi berjalannya pembangunan pada suatu daerah serta dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut” (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin *et. al.* (2010), Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sumarjo (2010), Ayuningsih (2016) yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung belanja daerah (X_2) (1,114) < t tabel (2,00) dengan p value 0.381 (>0.05) . Sehingga H_2 , artinya tidak terdapat pengaruh antara belanja daerah (X_2) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau.

APBD disusun bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun jika alokasi APBD lebih besar pada alokasi untuk dana operasional, bukan pada pembangunan maka kinerja pemerintah juga tidak akan meningkat. Dari data yang diperoleh alokasi APBD pada pemerintah daerah masih lebih besar pada belanja operasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih (2016) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung *intergovernmental revenue* (X3) (4,501) > t tabel (2,00) dengan nilai p value 0.000 (<0.05) . Koefisien beta menunjukkan nilai positif 3.565, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima , *intergovernmental revenue* (X₄) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin besar *intergovernmental revenue* maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utomo (2015) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016), Utomo (2015), Suryaningsih dan Sisdyani (2016) dan Sisdyani (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengaruh temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung temuan audit (X4) (1,879) < t tabel (2,00) dengan p value 0.201 (> 0.05) . Sehingga H₄ artinya tidak terdapat pengaruh antara temuan audit (X4) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau.

Temuan audit BPK dapat ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit berkaitan dengan opini yang akan diberikan oleh BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan apabila pemerintah telah menyajikan informasi yang bebas dari salah saji material pada laporan keuangannya, yang diyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Walaupun terdapat temuan pemeriksaan, temuan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Oleh sebab itu jumlah temuan audit tidak berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2017) dan Purba (2019) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu.

Tabel 7
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 ^a	.928	.750	.05327	1.832

a. Predictors: (Constant), Temuan_audit, Rasio_kemandirian, Kekayaan_daerh, Belanja_daerh, Intergov_reve

b. Dependent Variable: Kinerja_pemda

Sumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS versi 23.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kekayaan daerah (X_1), belanja daerah (X_2), rasio kemandirian (X_3), *intergovernmental revenue* (X_4) dan temuan audit (X_5) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat, yaitu kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau), hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,964. Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,750. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni kekayaan daerah (X_1), belanja daerah (X_2), rasio kemandirian (X_3), *intergovernmental revenue* (X_4) dan temuan audit (X_5) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Provinsi Riau yaitu sebesar 75 %. Artinya variabel bebas yakni kekayaan daerah (X_1), belanja daerah (X_2), rasio kemandirian (X_3), *intergovernmental revenue* (X_4) dan temuan audit (X_5) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau) sebesar 75 %.

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Peningkatan kekayaan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Meningkatnya Intergovernmental Revenue akan

meningkatkan kinerja pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan temuan audit (BPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya: Penelitian ini tidak dapat mencapai keseluruhan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, hanya satu propinsi saja yakni Propinsi Riau sehingga hasil penelitian yang diharapkan belum maksimal. Sehingga disarankan penelitian selanjutnya meneliti objek yang lebih luas. Penelitian ini hanya menggunakan kekayaan daerah, belanja daerah, *intergovernmental revenue*, temuan audit (BPK) untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah, ada baiknya penelitian selanjutnya menambah variabel lainnya seperti ukuran legislatif, ketepatan sasaran anggaran, opini audit, dan lain-lain.

Penelitian ini memiliki kontribusi pada pemerintah daerah yaitu dapat meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kekayaan daerah dengan cara menggali potensi daerah.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2017). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung). Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018. *Bahtera Inovasi*, 4(1), 36 - 53. Retrieved from
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang
- Armaja., Ibrahim.R., & Aliamin (2017) Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 3 .No 2
- Ayuningsih, D. (2016). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2015. <http://bpk.go.id/> diakses 26 Maret 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2015. <http://bpk.go.id/> diakses 26 Maret 2016
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44, 193-223
- Doyle, J., W. Ge, dan S. McVay., (2006). Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting, *Journal of Accounting and Economics*
- Fauza, N., (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah se Sumatera). Skripsi Sarjana. UNRI. Pekanbaru
- Ghozali.I (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali.I (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss, Cetakan 4. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Halim, A & Abdullah. S (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 2.

- Hartono, R, Amir. M & Nanik. S. U. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*
- Indriantoro & Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta
- Julitawati (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Juwita.R., (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 3(1), 69 - 74. Retrieved from <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/318>
- Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Volume 9, No. 1
- Kuncoro. (2001). Metode Kuantitatif: Teori Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Pertama. AMP YKPN: Yogyakarta
- Laswad, F., Richard. F & Peter ,O. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. www.elsevier.com
- Maiyora, G. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera), Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Martani dan Zaelani. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan*. Universitas Udayana. Bali.
- Mustikarini, W, A & Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Noviyanti, N., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Nurwati, I. R. T.. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Jurnal ISSN*.
- Purba N. I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Puspitasari, T. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas pemerintah daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia). *Skripsi Sarjana*. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Putro, P. U. W. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Sarjana*. Universitas Negeri Semarang
- Rustiadi, S, S & Panuju. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Saggaf. (1999). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya, Pekanbaru. Tesis. Medan.
- Sirojuzilam & Mahalli. (2011). Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. Medan: USU Press
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suryaningsih, N. M. & Sisdayani, E. A. (2016). *Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Udayana, Bali.
- Tama.I.G.M.A.A & Adi.P.H (2018) Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah,Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Perspektif Akuntansi*.Vol 1.No.1
- Utomo, S. P. (2012) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediasi. Universitas Sebelah Maret, Surakarta.
- Usman.R.,& Misra.F., (2019) Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah: Pengujian Legislative Power Sebagai Variabel Pemoderasi.e *Jurnal Akuntansi*.Vol 29 No 2